



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERKARA DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN**

**PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM**



2023

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DAFTAR ISI

- 1. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/Per/Set.Mk/2007 Tentang Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi**
- 2. Nota Dinas Penyampaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Bulan Desember 2021**
- 3. Nota Dinas Penyampaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Bulan Januari 2022**
- 4. Nota Dinas Penyampaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Bulan Maret 2022**
- 5. Surat Peringatan Siti Rosmalina Nurhayati**
- 6. Surat Peringatan Luthfi Widagdo Eddyono**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 004/PER/SET.MK/2007 TENTANG KODE ETIK DAN
PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan integritas dan kepribadian Pegawai Mahkamah Konstitusi, agar berperilaku baik, bersih, disiplin, serta tidak tercela dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur aparatur sipil negara dan abdi masyarakat, perlu disusun kode etik dan perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bahwa Persekjen Nomor 004/PER/SET.MK/2007 belum mengatur beberapa aspek terkait kode etik dan perilaku Pegawai dan guna memenuhi kebutuhan hukum pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Percepatan Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999



- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);



8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 004/PER/SET.MK/2007 TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Pasal 1

Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Tata cara penegakan Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 02 Desember 2021
SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH



Digital Signature
mk-85319051211202105301

LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 40 TAHUN 2021
TANGGAL 02 Desember 2021

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 004/PER/SET.MK/2007
TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI
MAHKAMAH KONSTITUSI**

PEMBUKAAN

Bahwa merupakan tugas mulia dan keniscayaan bagi para Pegawai Mahkamah Konstitusi untuk melayani dan mendukung upaya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pelayanan dan dukungan para Pegawai dilakukan secara maksimal. Para Pegawai senantiasa memelihara, menjaga, dan meningkatkan dedikasi, kualitas, dan profesional dalam bekerja, serta berperilaku baik, bersih, disiplin, tidak tercela, dan sadar akan tanggung jawab.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dirumuskan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman yang berisi nilai dan norma untuk memandu dan menilai perilaku Pegawai secara terukur dan terus menerus.

Bahwa atas dasar pemikiran tersebut, dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat pada umumnya, perlu menyempurnakan rumusan Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari delapan nilai yaitu Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Integritas, Kerahasiaan, Kejujuran, Kesetiaan Tugas, Pelayanan, Kesetaraan dan Kesederhanaan beserta norma-norma penerapannya.

Bahwa prinsip yang termuat dalam Kode Etik dan Perilaku Pegawai ini dimaksudkan untuk melengkapi dan bukan untuk mengurangi ketentuan hukum dan perilaku yang telah ada dan mengikat Pegawai Mahkamah Konstitusi.



NILAI PERTAMA

KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Butir penerapan:

1. Dalam kehidupan sehari-hari berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dalam pengawasan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin.
2. Dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa ditumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama yang berbeda-beda, sehingga selalu dibina kerukunan hidup beragama serta tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain.
3. Dalam kondisi apapun dikembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial yang berlaku, serta meningkatkan etos kerja, disiplin, produktivitas, dan rasa kesetiakawanan sosial.

NILAI KEDUA

INTEGRITAS

Merupakan sikap batin dan tindakan atau perbuatan yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap pegawai, baik sebagai pribadi dan sebagai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya.



Butir penerapan:

1. Dalam menjalankan tugasnya, Pegawai harus jujur, konsisten, dan tidak boleh menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik materiil maupun nonmateriil bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain.
2. Pegawai dilarang dengan sengaja memerintahkan atau mengizinkan sesama pegawai, baik secara horizontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya, baik atasan maupun pegawai yang bersangkutan.
3. Dengan tetap terikat pada prinsip keterbukaan (transparansi), pegawai tidak boleh menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun, termasuk kenang-kenangan dalam suatu acara yang ditujukan secara langsung kepada pegawai yang bersangkutan, kecuali yang diperbolehkan sebagai berikut:
 - a. Menerima plakat, piagam, piala untuk dipajang;
 - b. Pemberian dari luar negeri dapat untuk di-display, tidak dapat diterima oleh pejabatnya;
 - c. Seminar kit yang diberikan berlaku umum, kecuali ada bernilai setara uang;
 - d. Buku-buku untuk menambah pengetahuan;
 - e. Kelahiran, aqiqah, pernikahan, tasyakuran berupa makanan dan setara uang sebesar maksimal Rp 500.000,- per orang;
 - f. Musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000 per pemberian per orang;
 - g. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang sebesar maksimal Rp 300.000,- per pemberi, dengan total pemberian Rp 1.000.000,- dalam setahun;



Semua hal yang diberikan melebihi dari ketentuan di peraturan ini, diserahkan kepada panti asuhan, panti jompo, panti sosial.

4. Pegawai tidak boleh menerima segala bentuk pembayaran.
5. Pegawai dilarang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, kecuali dalam hal pelaksanaan tugas dinas dengan tetap menjaga integritas dan independensi lembaga Mahkamah Konstitusi.

NILAI KETIGA

KERAHASIAAN

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam menjaga dan menyimpan informasi yang belum diperuntukkan menjadi informasi publik baik lisan maupun tulisan yang terkait dengan rahasia negara atau rahasia jabatan terhadap pihak yang tidak berwenang.

Butir penerapan:

1. Pegawai dilarang memberikan dan/atau memanfaatkan informasi yang bersifat rahasia, baik di bidang administrasi umum maupun administrasi justisial.
2. Pegawai dilarang mengemukakan informasi yang berhubungan dengan kegiatan para Hakim Konstitusi kepada pihak lain berkaitan dengan kasus yang masih dalam pemeriksaan, termasuk catatan Hakim, draft putusan, hasil penelitian, diskusi internal, memo internal, legal opinion, catatan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, dan makalah-makalah yang berkait.
3. Pegawai dilarang memberikan komentar atas perkara yang akan, sedang atau telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi kepada pihak lain secara terbuka kecuali dalam



forum ilmiah atau jurnal/artikel ilmiah atas nama dan tanggung jawab pribadi yang dinyatakan secara jelas.

4. Pegawai boleh menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum maupun bidang lainnya dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas dinas dan terikat pada aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi.

NILAI KEEMPAT

KEJUJURAN

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas selalu dilandasi oleh satunya kata dan perbuatan.

Butir penerapan:

1. Pegawai dilarang:
 - a. Menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi.
 - b. Menerima imbalan dan tip dalam bentuk apapun atas jasanya membantu pihak yang melakukan transaksi (rekanan) atau pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.
 - c. Secara sadar mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Mahkamah Konstitusi.
 - d. Memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam kondisi apa pun yang dapat diketahui atau patut diduga bahwa kepentingan pemberi adalah untuk memengaruhi Pegawai dalam menjalankan tugasnya.



2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku bagi Pegawai dalam hal:
 - a. Menerima penghargaan atau anugerah dari publik atas jasa-jasanya.
 - b. Menerima pinjaman secara komersial berdasarkan penalaran yang wajar yang diberikan sebagai bagian dari transaksi rutin dengan pemberi pinjaman.

NILAI KELIMA

KESETIAAN PADA TUGAS

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri serta menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain.

Butir penerapan:

1. Pegawai harus mengutamakan tugas pokok dan fungsinya di Mahkamah Konstitusi.
2. Pegawai diperbolehkan melaksanakan pekerjaan pada hari dan jam kerja sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang melakukan praktik hukum di pengadilan atau yang memiliki keterkaitan dengan Mahkamah Konstitusi.
 - b. Tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pegawai.
 - c. Bukan merupakan praktik hukum, kecuali sebagai pengajar, dosen atau narasumber di sekolah-sekolah hukum, pengamat atau mengikuti pendidikan.
 - d. Tidak memberikan informasi rahasia Mahkamah Konstitusi kepada pihak lain.
 - e. Ditugaskan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi dengan surat tugas.
3. Pegawai harus menolak pekerjaan di luar jam kerja bila terjadi konflik kepentingan atau diduga ada gejala akan terjadi konflik kepentingan atau pekerjaan dengan para pihak yang



berperkara yang memberi akibat bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Mahkamah Konstitusi, kecuali dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi.

4. Pegawai harus mendedikasikan diri untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Pegawai dapat melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengurangi martabat peradilan atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

NILAI KEENAM

PELAYANAN

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.

Butir penerapan:

1. Pegawai melakukan tugas secara patuh, tekun dan fokus kepada pekerjaan.
2. Pegawai menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dengan sikap keramahan dan kesopanan.
3. Pegawai tidak dibenarkan mengubah, memalsukan, menghancurkan atau merusak setiap dokumen yang berada dalam pengawasannya, kecuali sudah diizinkan atau diperkenankan untuk dimusnahkan.
4. Pegawai tidak dibenarkan merekomendasikan pengacara tertentu kepada pihak yang akan berperkara dan/atau kepada pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi.



5. Pegawai berkewajiban untuk memelihara setiap Barang Milik Negara (BMN) Mahkamah Konstitusi.
6. Dalam menjalankan tugas pelayanan, Pegawai harus bersikap netral tidak memandang Suku, Agama, dan Ras, serta tidak bersikap diskriminatif.

NILAI KETUJUH

KESETARAAN

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap Pegawai untuk senantiasa memperlakukan semua pihak secara sama dalam melaksanakan tugasnya.

Butir penerapan:

1. Pegawai harus menyadari, memahami kemajemukan dalam masyarakat serta perbedaan-perbedaan yang timbul berdasarkan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama, golongan, kondisi, fisik, umur, status sosial, status ekonomi, dan keyakinan politik.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakan, Pegawai dilarang berprasangka buruk terhadap seseorang atau suatu kelompok tanpa alasan yang relevan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai tidak membeda-bedakan terhadap seseorang atau suatu kelompok tanpa alasan yang relevan.



NILAI KEDELAPAN

KESEDERHANAAN

Merupakan sikap dan perilaku pegawai yang mencerminkan pola hidup sederhana atau tidak berlebihan.

Butir penerapan:

1. Pegawai dalam aktivitas sehari-hari harus bersifat ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan dari kesan yang berlebihan.
2. Pegawai harus dapat menahan diri untuk tidak menggunakan perhiasan, kosmetik, dan berpenampilan yang berlebihan.
3. Pegawai dituntut untuk selalu bersahaja dan menjauhkan dari sifat-sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.
4. Pegawai selalu memberikan contoh teladan dalam pergaulan di kantor, maupun di lingkungan masyarakat.

Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi ini, ditandatangani oleh atas nama Pegawai Mahkamah Konstitusi pada tanggal dtetapkan.

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS
108/2200/KP.02.04/01/2022**

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Penyampaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Bulan Desember 2021
Tanggal : 19 Januari 2022

Dengan hormat, berdasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa ASN yang melakukan pelanggaran disiplin akan diberikan sanksi. Pemberian sanksi dimaksud dilakukan secara bertahap.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan pegawai yang telah melakukan pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali dan melakukan presensi di luar Jabodetabek pada bulan Desember 2021:

A. PNS

No.	Nama	Tanggal	Keterangan	Jenis Hukuman
1.	Edwin Rivano	14 Desember 2021	Tidak presensi pulang kerja	SP3
		15 Desember 2021	Tidak presensi pulang kerja	
		21 Desember 2021	Terlambat 6 menit	
		31 Desember 2021	Terlambat 37 menit	
2.	Muhammad Radhi Zhafari	13 Desember 2021	Terlambat 4 menit	SP1
		22 Desember 2021	Terlambat 45 menit	
		23 Desember 2021	Terlambat 18 menit	
		27 Desember 2021	Terlambat 1 menit	
3.	Jeklin Indriani Br Purba	1 Desember 2021	Terlambat 19 menit	SP1
		21 Desember 2021	Terlambat 56 menit	
		24 Desember 2021	Terlambat 49 menit	
		29 Desember 2021	Terlambat 1 jam	
4.	Dillon Davin Zebadiah	7 Desember 2021	Terlambat 10 menit	SP1
		14 Desember 2021	Terlambat 19 menit	
		28 Desember 2021	Terlambat 3 menit	
		29 Desember 2021	Terlambat 4 menit	
5.	Mohammad Chamid Zuhri	1 Desember 2021	Terlambat 6 menit	HD
		9 Desember 2021	Terlambat 16 menit	
		14 Desember 2021	Terlambat 1 menit	
		16 Desember 2021	Tidak presensi pulang kerja	
		21 Desember 2021	Tidak presensi pulang kerja	
		22 Desember 2021	Terlambat 43 menit	
		24 Desember 2021	Terlambat 19 menit, tidak presensi pulang kerja	
		27 Desember 2021	Terlambat 1 jam 37 menit	
29 Desember 2021	Terlambat 17 menit			
6.	Evi Soraya Eka Putri	6 Desember 2021	Terlambat 9 menit	SP2
		15 Desember 2021	Terlambat 2 menit	
		16 Desember 2021	Pulang cepat 2 menit	
		23 Desember 2021	Terlambat 6 menit	
		30 Desember 2021	Terlambat 1 menit	



7.	Supriyanto	7 Desember 2021	Terlambat 3 jam 3 menit	SP1
		16 Desember 2021	Terlambat 1 menit	
		27 Desember 2021	Terlambat 58 menit	
		31 Desember 2021	Presensi pulang kerja pukul 00.20 WIB	
8.	Siswantana Putri Rachmatika	1 Desember 2021	Terlambat 9 menit	SP2
		6 Desember 2021	Presensi pulang kerja pukul 03.53 WIB	
		7 Desember 2021	Terlambat 23 menit	
		9 Desember 2021	Terlambat 16 menit	
		10 Desember 2021	Presensi pulang kerja pukul 02.27 WIB	
9.	Andi Aprilla Megananda Sanusi	2 Desember 2021	Terlambat 1 jam 51 menit	SP1
		7 Desember 2021	Terlambat 10 menit	
		14 Desember 2021	Terlambat 1 jam 2 menit	
		29 Desember 2021	Terlambat 1 menit	
10.	Irvan Afrialdi Awaludin Muchtar	2 Desember 2021	Terlambat 27 menit	SP1
		15 Desember 2021	Terlambat 5 menit	
		27 Desember 2021	Terlambat 10 menit	
		31 Desember 2021	Terlambat 4 menit	
11.	Titis Anindyajati	14 Desember 2021	Tidak presensi pulang kerja	SP1
		16 Desember 2021	Pulang cepat 4 jam 32 menit	
		24 Desember 2021	Terlambat 27 menit	
		31 Desember 2021	Pulang cepat 1 jam 5 menit	
12.	Intan Permata Putri	7 Desember 2021	Terlambat 28 menit	HD
		16 Desember 2021	Terlambat 6 menit	
		20 Desember 2021	Terlambat 11 menit	
		28 Desember 2021	Pulang cepat 3 jam 11 menit	
		29 Desember 2021	Terlambat 13 menit	
13.	Wafda Afina Dianastuti	1 Desember 2021	Tidak presensi pulang kerja	SP3
		3 Desember 2021	Tidak presensi pulang kerja	
		15 Desember 2021	Terlambat 31 menit	
		27 Desember 2021	Presensi pulang kerja 00.09 WIB	
14.	Ade Kurniawan	1 Desember 2021	Terlambat 6 menit	SP1
		7 Desember 2021	Terlambat 2 jam 4 menit	
		9 Desember 2021	Terlambat 4 jam 19 menit, tidak presensi pulang kerja	
		10 Desember 2021	Terlambat 48 menit	
		16 Desember 2021	Presensi masuk kerja pukul 17.28 WIB	
		24 Desember 2021	Terlambat 1 jam 40 menit	
		29 Desember 2021	Terlambat 15 menit	
15.	Lutfi Yudhistira	7 Desember 2021	Terlambat 25 menit	SP2
		13 Desember 2021	Presensi pulang kerja pukul 00.56 WIB	
		14 Desember 2021	Terlambat 2 jam 37 menit, presensi pulang kerja pukul 00.05 WIB	
		15 Desember 2021	Terlambat 7 menit	
		16 Desember 2021	Terlambat 55 menit, presensi pulang kerja pukul 02.30 WIB	
		17 Desember 2021	Terlambat 1 jam 32 menit, tidak presensi pulang kerja	
		20 Desember 2021	Terlambat 1 jam 39 menit	
16.	Syarief Hidayatullah	1 Desember 2021	Presensi masuk kerja pukul 20.45 WIB	SP1



		6 Desember 2021	Tidak presensi pulang kerja	
		15 Desember 2021	Terlambat 1 jam 22 menit	
		31 Desember 2021	Terlambat 2 menit	
17.	Kin Isura Ginting	1 Desember 2021	Terlambat 16 menit	SP3
		6 Desember 2021	Terlambat 6 menit	
		14 Desember 2021	Terlambat 16 menit	
		24 Desember 2021	Terlambat 2 menit	
18.	Novena Jati Nugraha	1 Desember 2021	Presensi masuk kerja pukul 21.33 WIB	SP3
		6 Desember 2021	Terlambat 1 menit	
		7 Desember 2021	Presensi pulang kerja pukul 03.08 WIB	
		9 Desember 2021	Terlambat 7 menit	
		20 Desember 2021	Terlambat 1 jam 25 menit	
		23 Desember 2021	Terlambat 2 menit	
		27 Desember 2021	Presensi pulang kerja pukul 00.12 WIB	
		30 Desember 2021	Presensi masuk kerja pukul 22.55 WIB	
19.	Fransisca	1 Desember 2021	Terlambat 3 menit	SP1
		8 Desember 2021	Tidak presensi pulang kerja	
		22 Desember 2021	Tidak presensi pulang kerja	
		24 Desember 2021	Tidak presensi pulang kerja	

B. PPNPN

No.	Nama	Tanggal	Keterangan	Jenis Hukuman
1.	Rudi Kurniawan (Programmer)	1 Desember 2021	Terlambat 4 jam 1 menit	SP3
		2 Desember 2021	Terlambat 4 jam 55 menit	
		7 Desember 2021	Terlambat 23 menit	
		13 Desember 2021	Terlambat 1 jam 21 menit	
		14 Desember 2021	Terlambat 44 menit	
		24 Desember 2021	Terlambat 1 jam 46 menit	
		28 Desember 2021	Terlambat 3 jam 23 menit	
		29 Desember 2021	Terlambat 2 jam 5 menit	
		31 Desember 2021	Terlambat 3 jam 3 menit	
2.	Bambang Panji Erawan (Reporter)	1 Desember 2021	Terlambat 3 menit	HD
		8 Desember 2021	Terlambat 16 menit	
		9 Desember 2021	Terlambat 18 menit	
		15 Desember 2021	Terlambat 11 menit, Tidak melakukan presensi pulang kerja	
		20 Desember 2021	Terlambat 26 menit	
		23 Desember 2021	Terlambat 6 menit	
3.	Hamdi (Tenaga Kamera Person)	10 Desember 2021	Tidak melakukan presensi pulang kerja	SP1
		20 Desember 2021	Tidak melakukan presensi pulang kerja	
		21 Desember 2021	Terlambat 1 menit	
		31 Desember 2021	Terlambat 9 menit	



C. Pegawai Kontrak

No.	Nama	Tanggal	Keterangan	Jenis Hukuman
1.	Basrul Hafi (Petugas Kebersihan)	7 Desember 2021	Terlambat 15 menit	HD
		10 Desember 2021	Terlambat 11 menit	
		23 Desember 2021	Terlambat 12 menit	
		27 Desember 2021	Terlambat 6 menit	
		28 Desember 2021	Terlambat 14 menit	
		30 Desember 2021	Terlambat 6 menit	
		31 Desember 2021	Terlambat 16 menit	
2.	Ikuy Yulianti (Petugas Pramusaji)	20 Desember 2021	Melakukan presensi masuk di luar Jabodetabek	SP1
3.	Ade Fadilla Yusuf (Teknisi)	1 Desember 2021	Terlambat 13 menit	HD
		2 Desember 2021	Terlambat 7 menit	
		13 Desember 2021	Terlambat 4 menit	
		14 Desember 2021	Terlambat 32 menit	
		16 Desember 2021	Terlambat 5 menit	
		21 Desember 2021	Terlambat 5 menit	
		24 Desember 2021	Terlambat 3 menit	
		27 Desember 2021	Terlambat 31 menit	
4.	Guntur Ari Wibowo (Teknisi)	14 Desember 2021	Terlambat 21 menit	SP1
		15 Desember 2021	Terlambat 12 menit	
		17 Desember 2021	Terlambat 47 menit	
		27 Desember 2021	Presensi masuk di luar lokasi kantor	
		29 Desember 2021	Terlambat 22 menit	
		30 Desember 2021	Terlambat 13 menit	
5.	Akhmad Sobari (Tenaga Pengamanan)	6 Desember 2021	Terlambat 3 menit	SP1
		17 Desember 2021	Terlambat 8 menit	
		23 Desember 2021	Terlambat 47 menit	
		29 Desember 2021	Terlambat 30 menit	
6.	M. Rudiantna (Tenaga Pengamanan)	6 Desember 2021	Terlambat 7 menit	SP1
		7 Desember 2021	Terlambat 6 menit	
		22 Desember 2021	Terlambat 12 menit	
		29 Desember 2021	Terlambat 7 menit	
7.	Taufan (Tenaga Pengamanan)	2 Desember 2021	Tidak melakukan presensi pulang kerja	HD
		8 Desember 2021	Tidak melakukan presensi pulang kerja	
		20 Desember 2021	Terlambat 8 menit	
		24 Desember 2021	Terlambat 3 menit Pulng cepat 11 jam 7 menit	
8.	Supardin (Tenaga Pengemudi)	17 Desember 2021	Presensi di luar lokasi kerja	SP1
		24 Desember 2021	Presensi di luar lokasi kerja	
		27 Desember 2021	Presensi di luar lokasi kerja	
		28 Desember 2021	Presensi di luar lokasi kerja	
		29 Desember 2021	Tidak melakukan Presensi online	
		31 Desember 2021	Tidak melakukan Presensi online	
9.	Romadhani Sofyan (Tenaga Pengemudi)	10 Desember 2021	Presensi di luar lokasi kerja	SP2
		17 Desember 2021	Presensi di luar lokasi kerja	
		22 Desember 2021	Presensi di luar lokasi kerja	



		31 Desember 2021	Presensi di luar lokasi kerja	
10.	Agus Suwito (Tenaga Pengemudi)	3 Desember 2021	Terlambat 10 Menit	SP1
		7 Desember 2021	Terlambat 1 Menit	
		9 Desember 2021	Terlambat 24 Menit	
		10 Desember 2021	Pulang Cepat 3 jam 5 Menit	
11.	Irfan Thaufi (Tenaga Pengemudi)	1 Desember 2021	Terlambat 35 Menit	SP1
		3 Desember 2021	Terlambat 1 Jam 28 Menit	
		07 Desember 2021	Tidak melakukan Presensi online	
		08 Desember 2021	Terlambat 2 Menit	
		9 Desember 2021	Terlambat 1 Jam 32 Menit	
		10 Desember 2021	Terlambat 9 Jam 23 Menit, Tidak melakukan presensi pulang kerja	
		13 Desember 2021	Terlambat 11 Menit	
		16 Desember 2021	Terlambat 1 jam 37 menit	
		17 Desember 2021	Tidak melakukan Presensi online	
		24 Desember 2021	Terlambat 1 jam 20 menit, Presensi masuk di luar lokasi kerja	
		27 Desember 2021	Terlambat 9 Menit	
		28 Desember 2021	Terlambat 10 Menit	
		29 Desember 2021	Presensi masuk di luar lokasi kerja	
		30 Desember 2021	Terlambat 11 Menit	
31 Desember 2021	Terlambat 29 Menit			
12.	Usman Fauzi (Tenaga Pengemudi)	28 Desember 2021	Presensi di luar lokasi kerja	SP3
		29 Desember 2021	Presensi di luar lokasi kerja	
		30 Desember 2021	Presensi di luar lokasi kerja	
		31 Desember 2021	Presensi di luar lokasi kerja	
13.	Dwi Yus Sangius (Tenaga Mekanik)	10 Desember 2021	Terlambat 2 Menit	SP1
		27 Desember 2021	Terlambat 2 Menit	
		30 Desember 2021	Terlambat 3 Menit	
		31 Desember 2021	Terlambat 5 Meit	

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,
Teguh Wahyudi



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS
997/2200/KP.02.04/03/2022**

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Penyampaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Bulan Januari 2022
Tanggal : 14 Maret 2022

Dengan hormat, berdasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa ASN yang melakukan pelanggaran disiplin akan diberikan sanksi. Pemberian sanksi dimaksud dilakukan secara bertahap.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan pegawai yang telah melakukan pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali dan melakukan presensi di luar Jabodetabek pada bulan Januari 2022:

A. PNS

No.	Nama	Tanggal	Keterangan	Jenis Hukuman
1.	Muhammad Radhi Zhafari	7 Januari 2022	BAK	SP1
		11 Januari 2022	Terlambat 17 menit	
		17 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		21 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	
2.	Dillon Davin Zebadiah	3 Januari 2022	Presensi pulang kerja pukul 01.46 WIB	SP1
		10 Januari 2022	Presensi pulang kerja pukul 00.04 WIB	
		18 Januari 2022	Terlambat 1 menit	
		26 Januari 2022	Terlambat 39 menit	
		31 Januari 2022	Terlambat 51 menit	
3.	Haifa Arief Lubis	4 Januari 2022	Terlambat 18 menit	SP1
		10 Januari 2022	Terlambat 15 menit	
		11 Januari 2022	Terlambat 4 menit	
		24 Januari 2022	Presensi pulang kerja pukul 05.08 WIB	
4.	Aqmarina Rasika	3 Januari 2022	Terlambat 6 jam 7 menit	SP1
		7 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		12 Januari 2022	Terlambat 12 menit	
		31 Januari 2022	Terlambat 6 jam 53 menit	
5.	Tania Nitrina Nanda Lawi	3 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	SP1
		4 Januari 2022	Terlambat 1 jam 21 menit	
		5 Januari 2022	Terlambat 1 jam 36 menit	
		21 Januari 2022	Terlambat 1 jam 39 menit	
6.	Intan Permata Putri	3 Januari 2022	Terlambat 19 menit	SP1
		11 Januari 2022	Terlambat 10 menit	
		17 Januari 2022	Terlambat 14 menit	
		19 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	
7.	Budi Wijayanto	3 Januari 2022	Terlambat 11 menit	SP1
		13 Januari 2022	Terlambat 29 menit	
		24 Januari 2022	Terlambat 2 jam 27 menit	
		25 Januari 2022	Terlambat 4 menit	
8.	Widi Atmoko	3 Januari 2022	Presensi masuk kerja pukul 18.23 WIB	SP1



		5 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		11 Januari 2022	Terlambat 3 jam 9 menit, tidak presensi pulang kerja	
		14 Januari 2022	Terlambat 1 jam 41 menit	
		17 Januari 2022	Terlambat 1 jam 21 menit	
		21 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		31 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	
9.	Muhammad Halim	3 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	SP1
		14 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		19 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		25 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	
10.	Lutfi Yudhistira	3 Januari 2022	Terlambat 2 jam 11 menit, presensi pulang kerja pukul 00.18 WIB	SP1
		5 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		7 Januari 2022	Terlambat 52 menit	
		11 Januari 2022	Terlambat 1 jam 20 menit	
		12 Januari 2022	Terlambat 5 menit	
		17 Januari 2022	Terlambat 47 menit, presensi pulang kerja pukul 00.48 WIB	
		19 Januari 2022	Terlambat 2 jam 7 menit	
		24 Januari 2022	Terlambat 51 menit	
		25 Januari 2022	Presensi masuk kerja pukul 16.03 WIB	
11.	Yuanna Sisilia	4 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	SP1
		6 Januari 2022	Terlambat 1 jam 14 menit	
		10 Januari 2022	Presensi pulang kerja pukul 00.27 WIB	
		27 Januari 2022	Terlambat 1 jam 5 menit	
12.	Agusweka Poltak Siregar	4 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	SP1
		12 Januari 2022	Terlambat 17 menit	
		17 Januari 2022	Terlambat 1 jam 59 menit	
		18 Januari 2022	Terlambat 5 menit	
13.	Ujang Wahyu	10 Januari 2022	Terlambat 50 menit	SP1
		17 Januari 2022	Terlambat 5 jam 30 menit	
		19 Januari 2022	Terlambat 1 menit	
		24 Januari 2022	Terlambat 2 jam 31 menit	
		26 Januari 2022	Terlambat 1 jam 8 menit	
14.	Budi Asmoro	3 Januari 2022	BAK	SP1
		14 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		17 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		27 Januari 2022	Tidak presensi pulang kerja	

Adapun PNS yang melakukan presensi di luar Jabodetabek adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Tanggal	Keterangan	Jenis Hukuman
1.	Parikhin	14 Januari 2022	Melakukan presensi masuk kerja (WFH) di Tegal, Jawa Tengah	SP1
		28 Januari 2022	Melakukan presensi pulang kerja (WFH) di Tegal, Jawa Tengah	



B. PPNPN

No.	Nama	Tanggal	Keterangan	Jenis Hukuman
1.	Ishak Purnama (Programmer)	5 Januari 2022	Terlambat 33 menit	SP1
		11 Januari 2022	Terlambat 1 jam 56 menit	
		21 Januari 2022	Terlambat 7 menit	
		26 Januari 2022	Terlambat 40 menit	
2.	Rudi Kurniawan (Programmer)	3 Januari 2022	Terlambat 3 jam 53 menit	SP1
		6 Januari 2022	Terlambat 4 jam 7 menit	
		11 Januari 2022	Terlambat 1 jam 25 menit	
		13 Januari 2022	Terlambat 4 jam	
		24 Januari 2022	Terlambat 5 jam 1 menit	
		26 Januari 2022	Terlambat 10 jam 27 menit	

C. Pegawai Kontrak

No.	Nama	Tanggal	Keterangan	Jenis Hukuman
1.	Akhmad Sobari (Tenaga Pengamanan)	5 Januari 2022	Terlambat 5 menit	SP1
		14 Januari 2022	Terlambat 6 menit	
		16 Januari 2022	BAK	
		20 Januari 2022	Terlambat 24 menit	
		21 Januari 2022	Terlambat 9 menit	
		23 Januari 2022	BAK	
2.	Dadang Kusnandar (Tenaga Pengamanan)	3 Januari 2022	Terlambat 2 menit	SP1
		6 Januari 2022	Terlambat 12 menit	
		9 Januari 2022	Terlambat 16 menit	
		12 Januari 2022	Terlambat 13 menit	
		14 Januari 2022	Terlambat 1 menit	
3.	Rino Purwadi (Tenaga Pengamanan)	5 Januari 2022	Terlambat 9 menit	SP1
		6 Januari 2022	Terlambat 37 menit	
		13 Januari 2022	Tidak melakukan presensi pulang	
		17 Januari 2022	Terlambat 1 jam 21 menit, Pulang cepat 4 menit	
		18 Januari 2022	Terlambat 5 menit	
		24 Januari 2022	Terlambat 2 menit	
		31 Januari 2022	Tidak melakukan presensi pulang	
4.	Surachmat (Tenaga Pengamanan)	18 Januari 2022	BAK	SP1
		19 Januari 2022	BAK	
		24 Januari 2022	Pulang cepat 2 jam 39 menit	
		25 Januari 2022	BAK	
5.	Taufan (Tenaga Pengamanan)	1 Januari 2022	Tidak melakukan presensi pulang	SP1
		19 Januari 2022	BAK	
		25 Januari 2022	Tidak melakukan presensi pulang	
		31 Januari 2022	Terlambat 22 menit, Tidak melakukan presensi pulang	
6.	Wahyudin	8 Januari 2022	BAK	SP1



	(Tenaga Pengamanan)	12 Januari 2022	BAK	
		13 Januari 2022	BAK	
		26 Januari 2022	Tidak melakukan presensi pulang	
		31 Januari 2022	Tidak melakukan presensi pulang	
7.	Ade Fadilla Yusuf (Tenaga Tenkisi)	6 Januari 2022	Terlambat 13 menit	SP1
		12 Januari 2022	BAK	
		17 Januari 2022	Terlambat 6 menit	
		24 Januari 2022	Terlambat 6 menit	
8.	Guntur Ari Wibowo (Tenaga Teknisi)	8 Januari 2022	Presensi tidak sesuai ST	SP1
		15 Januari 2022	Terlambat 1 jam 3 menit	
		16 Januari 2022	Terlambat 40 menit	
		30 Januari 2022	Terlambat 20 menit	
9.	Himawan Julianto (Tenaga Teknisi)	2 Januari 2022	Terlambat 12 menit	SP1
		11 Januari 2022	Terlambat 2 jam 43 menit	
		12 Januari 2022	Terlambat 3 jam 10 menit	
		13 Januari 2022	Terlambat 10 jam 58 menit	
		14 Januari 2022	Terlambat 10 jam 31 menit	
		16 Januari 2022	BAK	
		29 Januari 2022	Terlambat 45 menit	
10.	Muhammad Fadhil (Tenaga Teknisi)	1 Januari 2022	Terlambat 2 menit	SP1
		11 Januari 2022	Terlambat 2 menit	
		14 Januari 2022	Terlambat 13 menit	
		21 Januari 2022	BAK	
11.	Ahmad Satiri (Petugas Kebersihan)	6 Januari 2022	BAK	SP1
		20 Januari 2022	Pulang cepat 3 jam 29 menit	
		21 Januari 2022	Pulang cepat 2 jam 44 menit	
		29 Januari 2022	Terlambat 3 menit	
12.	Basrul Hafi (Petugas Kebersihan)	7 Januari 2022	Pulang cepat 2 jam 15 menit	SP1
		8 Januari 2022	Terlambat 22 menit	
		10 Januari 2022	Terlambat 15 menit	
		19 Januari 2022	Terlambat 1 menit	
13.	Deni Setiawan (Petugas Pramubakti)	1 Januari 2022	Terlambat 2 jam 10 menit	SP1
		4 Januari 2022	Terlambat 4 menit	
		8 Januari 2022	Terlambat 34 menit	
		15 Januari 2022	Terlambat 3 jam 29 menit	
		29 Januari 2022	Terlambat 48 menit	
14.	Edy Kadarusyanto (Petugas Kebersihan)	13 Januari 2022	Terlambat 1 jam 1 menit	SP1
		16 Januari 2022	Terlambat 1 jam 8 menit	
		21 Januari 2022	Terlambat 25 menit	
		28 Januari 2022	Terlambat 15 menit	
15.	Iwan Setiawan (Petugas Kebersihan)	6 Januari 2022	Presensi tidak sesuai ST Terlambat 3 jam 41 menit	SP1
		7 Januari 2022	Presensi tidak sesuai ST Terlambat 4 jam	
		10 Januari 2022	Presensi pulang pukul 07.03 besok hari	
		11 Januari 2022	Terlambat 5 menit	
		24 Januari 2022	BAK	
16	Muhamad Rustam (Petugas Kebersihan)	1 Januari 2022	Presensi tidak sesuai ST	SP1
		11 Januari 2022	Terlambat 2 menit	



		19 Januari 2022	Terlambat 15 menit	
		20 Januari 2022	Terlambat 23 menit	
17.	Nurhafni Syahrani (Petugas Kebersihan)	13 Januari 2022	Presensi tidak sesuai ST	SP1
		14 Januari 2022	Presensi tidak sesuai ST	
		19 Januari 2022	Presensi pulang pukul 06.50 besok hari	
		25 Januari 2022	BAK	
		27 Januari 2022	BAK	
18.	Suparman (Petugas Kebersihan)	6 Januari 2022	Terlambat 9 menit	SP1
		9 Januari 2022	Presensi tidak sesuai ST	
		10 Januari 2022	Presensi tidak sesuai ST	
		17 Januari 2022	Terlambat 7 menit	
		20 Januari 2022	Terlambat 8 menit	
		21 Januari 2022	Terlambat 8 menit	
		26 Januari 2022	Terlambat 16 menit	
19.	Agus Satryo Hartanto (Tenaga Pengemudi)	03 Januari 2022	Presensi tidak sesuai ST Terlambat 1 jam 47 menit Presensi pulang pukul 05.58 besok hari	SP1
		12 Januari 2022	Presensi pulang pukul 06.03 besok hari	
		21 Januari 2022	BAK	
		24 Januari 2022	BAK	
		26 Januari 2022	Terlambat 7 Menit	
20.	Alex Hengki F. Gultom (Tenaga Pengemudi)	7 Januari 2022	Tidak melakukan presensi Pulang Kerja	SP1
		11 Januari 2022	Terlambat 3 Menit	
		17 Januari 2022	Terlambat 1 jam 5 Menit, Pulang Cepat 29 Menit	
21.	M. Iqbal (Tenaga Pengemudi)	3 Januari 2022	Terlambat 26 Menit	SP1
		5 Januari 2022	Terlambat 29 Menit	
		6 Januari 2022	Terlambat 2 Jam 59 Menit	
		11 Januari 2022	Terlambat 2 jam 6 menit	
		13 Januari 2022	Terlambat 24 Menit	
		17 Januari 2022	Terlambat 1 jam 7 menit	
		18 Januari 2022	Terlambat 1 Jam 27 Menit	
		19 Januari 2022	Telambat 32 menit, Pulang Cepat 11 Menit	
		20 Januari 2022	Terlambat 3 Jam 45 Menit	
		24 Januari 2022	Terlambat 51 Menit	
		25 Januari 2022	Terlambat 7 Jam 19 Menit	
		26 Januari 202	Terlambat 4 Jam 39 menit, Pulang Cepat 2 Jam 28 Menit	
		27 Januari 2022	Terlambat 20 Menit	
		28 Januari 2022	Terlambat 1 Jam 19 Menit	
		31 Januari 2022	Terlambat 18 menit	
22.	Yanuar (Tenaga Pengemudi)	3 Januari 2022	Terlambat 11 Menit	SP1
		4 Januari 2022	Terlambat 16 Menit	
		5 Januari 2022	Presensi pulang pukul 03.54 besok hari	
		6 Januari 2022	Presensi pulang pukul 00.25	
		10 Januari 2022	Terlambat 1 menit	
		11 Januari 2022	Terlambat 15 Menit	
		12 Januari 2022	Terlambat 2 Menit	
		17 Januari 2022	Terlambat 6 Menit, pulang cepat 3 Menit	



	18 Januari 2022	Terlambat 18 Menit, Presensi pulang ukul 07.40 besok hari
	19 Januari 2022	Terlambat 11 Menit Pulang Cepat 19 Menit
	20 Januari 2022	Pulang cepat 25 Menit
	26 Januari 2022	Terlambat 2 Menit
	28 Januari 2022	Presensi pulang pukul 07.20 besok hari

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,
Teguh Wahyudi



Digital Signature
mk-1101323131220314074908

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS
1644/2200/KP.02.04/05/2022**

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Penyampaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Bulan Maret 2022
Tanggal : 12 Mei 2022

Dengan hormat, berdasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa ASN yang melakukan pelanggaran disiplin akan diberikan sanksi. Pemberian sanksi dimaksud dilakukan secara bertahap.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan pegawai yang telah melakukan pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali pada bulan Maret 2022:

A. PNS

No.	Nama	Tanggal	Keterangan	Jenis Hukuman
1.	Abdul Basid Fuadi	23 Maret 2022	Terlambat 20 menit	SP1
		24 Maret 2022	Terlambat 21 menit	
		25 Maret 2022	Terlambat 1 menit	
		30 Maret 2022	Terlambat 7 menit	
2.	Annisa Aska	1 Maret 2022	Terlambat 1 jam 48 menit	SP2
		2 Maret 2022	Tidak melakukan presensi pulang kerja	
		4 Maret 2022	Terlambat 24 menit	
		10 Maret 2022	Presensi masuk kerja pukul 22.14 WIB	
3.	Aris Wahyu Hajianto	8 Maret 2022	Terlambat 7 menit	SP1
		15 Maret 2022	Terlambat 14 menit	
		25 Maret 2022	Terlambat 11 menit	
		31 Maret 2022	Terlambat 3 menit	
4.	Intan Permata Putri	7 Maret 2022	Terlambat 2 menit	SP2
		18 Maret 2022	Terlambat 11 menit	
		21 Maret 2022	Terlambat 3 menit	
		25 Maret 2022	Presensi masuk kerja pukul 16.14 WIB	
5.	Kurniasih Panti Rahayu	4 Maret 2022	Terlambat 25 menit	SP1
		10 Maret 2022	Terlambat 27 menit	
		18 Maret 2022	Terlambat 1 menit	
		28 Maret 2022	Terlambat 7 menit	
6.	Lutfi Yudhistira	2 Maret 2022	Terlambat 56 menit	SP3
		14 Maret 2022	Terlambat 49 menit	
		16 Maret 2022	Terlambat 7 menit	
		17 Maret 2022	Presensi pulang kerja pukul 00.03 WIB	
		23 Maret 2022	Terlambat 42 menit	
		28 Maret 2022	Terlambat 1 jam 28 menit	
7.	Mohammad Arief	1 Maret 2022	Tidak presensi pulang kerja	SP2
		4 Maret 2022	Terlambat 4 menit	



		9 Maret 2022	Presensi pulang kerja pukul 05.16 WIB	
		17 Maret 2022	Terlambat 1 menit	
8.	Mohammad Chamid Zuhri	1 Maret 2022	Terlambat 53 menit	SP1
		9 Maret 2022	Terlambat 16 menit	
		11 Maret 2022	Presensi pulang kerja pukul 00.41 WIB	
		21 Maret 2022	Terlambat 22 menit	
9.	M. Ridho Ihsan	10 Maret 2022	Terlambat 53 menit	SP1
		15 Maret 2022	Terlambat 44 menit	
		17 Maret 2022	Terlambat 25 menit	
		18 Maret 2022	Terlambat 2 jam 40 menit	
		22 Maret 2022	Terlambat 1 jam 35 menit	
		23 Maret 2022	Terlambat 1 jam	
10.	Mardian Wibowo	7 Maret 2022	Terlambat 16 menit, tidak presensi pulang kerja	SP1
		8 Maret 2022	Terlambat 3 menit	
		9 Maret 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		14 Maret 2022	Terlambat 3 menit, tidak presensi pulang kerja	
11.	Rahadian Prima Nugraha	1 Maret 2022	Terlambat 19 menit	SP1
		9 Maret 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		14 Maret 2022	Terlambat 22 menit	
		21 Maret 2022	Terlambat 1 menit	
		25 Maret 2022	Terlambat 3 jam 7 menit	
12.	Raisa Ayuditha Marsaulina	2 Maret 2022	Terlambat 4 menit	SP1
		8 Maret 2022	Terlambat 19 menit	
		18 Maret 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		31 Maret 2022	Terlambat 7 menit	
13.	Riani Anggraini	1 Maret 2022	Terlambat 1 jam 17 menit	SP1
		7 Maret 2022	Terlambat 10 menit	
		8 Maret 2022	Terlambat 1 jam 20 menit	
		14 Maret 2022	Presensi pulang kerja pukul 15.11 WIB	
		17 Maret 2022	BAK	
		18 Maret 2022	Tidak presensi pulang kerja	
14.	Ricky Nafri Habibanda	10 Maret 2022	Terlambat 45 menit	SP1
		21 Maret 2022	Terlambat 3 jam 10 menit	
		22 Maret 2022	Terlambat 2 jam 2 menit	
		25 Maret 2022	Terlambat 3 menit	
15.	Riska Aprian	4 Maret 2022	Terlambat 30 menit	SP2
		11 Maret 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		16 Maret 2022	Terlambat 1 jam 20 menit	
		18 Maret 2022	Tidak presensi pulang kerja	
16.	Rosalia Agustin Shella H	1 Maret 2022	Tidak presensi pulang kerja	SP1
		4 Maret 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		10 Maret 2022	Presensi masuk kerja pukul 16.36 WIB	
		14 Maret 2022	Terlambat 52 menit	
		15 Maret 2022	Terlambat 32 menit	
		29 Maret 2022	Terlambat 1 jam 25 menit	
17.	Suryo Gilang Romadlon	1 Maret 2022	Presensi pulang kerja pukul 00.15 WIB	SP1



		7 Maret 2022	Terlambat 1 jam 45 menit	
		10 Maret 2022	Terlambat 1 jam 2 menit	
		14 Maret 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		15 Maret 2022	Presensi masuk kerja pukul 22.56 WIB	
		21 Maret 2022	Terlambat 4 jam 7 menit	
		23 Maret 2022	Terlambat 1 jam 11 menit	
		29 Maret 2022	Terlambat 2 menit	
18.	Yuanna Sisilia	1 Maret 2022	Presensi pulang kerja pukul 07.25 WIB	SP3
		7 Maret 2022	Presensi pulang kerja pukul 01.28 WIB	
		14 Maret 2022	Presensi pulang kerja pukul 15.33 WIB	
		31 Maret 2022	Terlambat 9 menit	
19.	Yunita Nurwulantari	1 Maret 2022	Terlambat 10 menit	SP1
		4 Maret 2022	Terlambat 2 menit	
		9 Maret 2022	Tidak presensi pulang kerja	
		28 Maret 2022	Terlambat 16 menit, tidak presensi pulang kerja	

B. PPNPN

No.	Nama	Tanggal	Keterangan	Jenis Hukuman
1	Aria Yudha (Network Engineer)	7 Maret 2022	Terlambat 52 menit	SP1
		15 Maret 2022	Terlambat 28 menit	
		23 Maret 2022	Terlambat 28 menit	
		28 Maret 2022	Terlambat 2 jam 10 menit	
2	Rudi Kurniawan (Programmer)	15 Maret 2022	Terlambat 4 jam 22 menit	SP3
		16 Maret 2022	Terlambat 5 jam 11 menit	
		21 Maret 2022	Terlambat 4 jam 29 menit	
		25 Maret 2022	Terlambat 1 jam 35 menit	
3	Pramana Aldyan Firzal (Transkriptor)	1 Maret 2022	Terlambat 16 menit	SP2
		8 Maret 2022	Terlambat 4 menit	
		24 Maret 2022	Terlambat 30 menit	
		28 Maret 2022	Terlambat 3 menit	
4	Irvan Rusmin (Petugas Protokol)	7 Maret 2022	BAK	SP3
		8 Maret 2022	BAK	
		9 Maret 2022	BAK	
		10 Maret 2022	BAK	
		11 Maret 2022	BAK	
		14 Maret 2022	Terlambat 14 jam 39 menit Tidak melakukan presensi pulang	
		28 Maret 2022	BAK	
29 Maret 2022	BAK			
5	Rudi (Penata Desain Grafis)	14 Maret 2022	Terlambat 12 menit	SP1
		21 Maret 2022	Terlambat 2 menit	
		22 Maret 2022	Tidak melakukan presensi pulang	
		29 Maret 2022	Terlambat 1 menit	



C. Pegawai Kontrak

No.	Nama	Tanggal	Keterangan	Jenis Hukuman
1	Nina Sumiani (Asisten Apoteker)	1 Maret 2022	Terlambat 4 menit Tidak melakukan presensi pulang	SP2
		10 Maret 2022	Terlambat 45 menit Tidak melakukan presensi pulang	
		11 Maret 2022	Tidak melakukan presensi pulang	
2	Sofyan Hadinata (Tenaga Pengamanan)	10 Maret 2022	Tidak melakukan Presensi Pulang Kerja	SP1
		18 Maret 2022	Terlambat 2 menit	
		23 Maret 2022	Tidak melakukan Presensi Pulang Kerja	
		30 Maret 2022	Tidak melakukan Presensi Pulang Kerja	
3	Taufan (Tenaga Pengamanan)	02 Maret 2022	Tidak melakukan Presensi Pulang Kerja	SP2
		07 Maret 2022	Tidak melakukan Presensi Pulang Kerja	
		25 Maret 2022	Terlambat 20 Menit Tidak melakukan presensi pulang kerja	
4	Guntur Ari Wibowo (Teknisi)	04 Maret 2022	Terlambat 8 menit	SP2
		07 Maret 2022	Terlambat 3 menit	
		14 Maret 2022	Terlambat 61 menit	
		15 Maret 2022	Terlambat 34 menit	
		25 Maret 2022	Terlambat 47 menit	
5	Edy Kadarusyanto (Petugas Kebersihan)	02 Maret 2022	Terlambat 44 menit	SP3
		07 Maret 2022	Terlambat 33 Menit	
		09 Maret 2022	Terlambat 16 menit	
		11 Maret 2022	Terlambat 21 Menit	
		15 Maret 2022	BAK	
		16 Maret 2022	Terlambat 5 Menit	
		21 Maret 2022	Terlambat 45 menit	
		29 Maret 2022	Terlambat 16 menit	
30 Maret 2022	Terlambat 43 menit			
6	Iis Lisnawati (Petugas Kebersihan)	01 Maret 2022	Terlambat 18 menit	SP2
		21 Maret 2022	Terlambat 6 menit	
		24 Maret 2022	BAK	
		28 Maret 2022	Terlambat 6 menit	
7	M. Rustam (Petugas Kebersihan)	01 Maret 2022	Terlambat 37 menit	SP3
		10 Maret 2022	Terlambat 23 menit	
		11 Maret 2022	BAK	
		23 Maret 2022	BAK	
8	Nurhafni Syahrani (Petugas Kebersihan)	02 Maret 2022	Tidak melakukan Presensi Pulang Kerja	SP2
		10 Maret 2022	BAK	
		11 Maret 2022	Terlambat 4 Jam 11 menit	
		22 Maret 2022	Presensi tidak pada lokasi kerja	
		25 Maret 2022	terlambat 1 menit	
9	Suparman (Petugas Kebersihan)	02 Maret 2022	Terlambat 23 menit	SP3
		04 Maret 2022	Terlambat 15 menit	



		09 Maret 2022	Terlambat 15 menit	
		10 Maret 2022	Terlambat 18 menit	
		11 Maret 2022	Terlambat 15 menit	
10	Suratno (Petugas Kebersihan)	01 Maret 2022	Terlambat 1 jam 5 menit	SP1
		15 Maret 2022	Terlambat 5 menit	
		22 Maret 2022	Terlambat 5 menit Tidak melakukan presensi pulang kerja	
		31 Maret 2022	BAK	
11	Yanuar (Petugas Pramubakti)	01 Maret 2022	Terlambat 1 Menit	SP3
		04 Maret 2022	Tidak melakukan Presensi Pulang Kerja	
		07 Maret 2022	Terlambat 3 Menit	
		09 Maret 2022	Pulang cepat 35 Menit	
		11 Maret 2022	Presensi tidak pada lokasi kerja	
		17 Maret 2022	Terlambat 14 Menit	
		22 Maret 2022	BAK	
		23 Maret 2022	BAK	
		24 Maret 2022	Pulang cepat 8 jam 52 menit	
		25 Maret 2022	Terlambat 16 menit	
		28 Maret 2022	BAK	
		29 Maret 2022	BAK	
		30 Maret 2022	BAK	
12	Yudi Winarno (Petugas Kebersihan)	02 Maret 2022	Terlambat 4 menit	SP1
		04 Maret 2022	Terlambat 3 menit	
		10 Maret 2022	Terlambat 2 menit	
		16 Maret 2022	WFH BAK	
13	Imam Suryadi (Tenaga Pengemudi)	01 Maret 2022	Terlambat 16 menit	SP1
		04 Maret 2022	Terlambat 22 menit	
		07 Maret 2022	Terlambat 30 menit	
		11 Maret 2022	Terlambat 07 menit	
		28 Maret 2022	Terlambat 08 menit	
14	Irfan Thaufi (Tenaga Pengemudi)	01 Maret 2022	BAK	SP2
		02 Maret 2022	BAK	
		07 Maret 2022	Terlambat 18 menit	
		09 Maret 2022	BAK	
		14 Maret 2022	BAK	
		18 Maret 2022	BAK	
		23 Maret 2022	Pulang cepat 8 jam 39 menit	
		25 Maret 2022	Terlambat 1 jam 13 menit	
15	Kevin Widiyanto (Tenaga Pengemudi)	01 Maret 2022	BAK	SP2
		02 Maret 2022	Terlambat 11 menit	
		04 Maret 2022	Terlambat 29 menit	
		11 Maret 2022	Terlambat 02 menit	
		21 Maret 2022	Terlambat 3 jam	
16	M. Iqbal (Tenaga Pengemudi)	01 Maret 2022	Terlambat 2 jam 41 menit	SP3
		02 Maret 2022	Terlambat 1 jam 59 menit Pulang cepat 58 menit	
		04 Maret 2022	Terlambat 1 jam 56 menit	



		08 Maret 2022	terlambat 2 jam 17 menit Pulang cepat 8 menit	
		15 Maret 2022	BAK	
		18 Maret 2022	Terlambat 1 jam 46 menit	
		22 Maret 2022	Terlambat 48 menit	
		23 Maret 2022	Terlambat 47 menit	
		28 Maret 2022	Terlambat 27 menit Pulang Cepat 1 jam 42 menit	
		29 Maret 2022	Terlambat 18 menit	
		30 Maret 2022	Terlambat 13 Menit	
		31 Maret 2022	Terlambat 58 Menit	
17	Mulya Suryana (Tenaga Pengemudi)	21 Maret 2022	Terlambat 4 jam Pulang cepat 3 jam 35 menit	SP2
		22 Maret 2022	Terlambat 1 jam 2 menit Pulang cepat 6 jam 16 menit	
		23 Maret 2022	Terlambat 8 jam 52 menit	
		24 Maret 2022	BAK	
		31 Maret 2022	Terlambat 12 jam 11 menit	

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,
Teguh Wahyudi



Digital Signature
mk-519838500220512110052



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 1091/KP.02.04/06/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Kontrak di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

Nama : Siti Rosmalina Nurhayati
NIK : 199005012017094062
Jabatan : Pengelola Jurnal Internasional Konstitusi
Unit Kerja : Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik ke luar Jabodetabek pada kurun waktu tanggal 6-17 Mei 2021, maka dengan ini, Plt. Kepala Subbagian Pembinaan dan Pengembangan PPNPN memberikan surat peringatan pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
2. Atas pelanggaran tersebut, pegawai yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan honorarium dukungan penanganan perkara sebesar 5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Surat Edaran Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 03 Juni 2021
Plt. Kepala Subbagian Pembinaan dan
Pengembangan PPNPN
Mastiur Afrilidiany Pasaribu

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan;
4. Inspektur.



Digital Signature
mk376551163210603095107



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 2378/KP.02.04/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

nama : Luthfi Widagdo Eddyono
NIP : 19821130 200604 1 003
jabatan : Peneliti Ahli Muda
unit kerja : Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu 4 (empat) kali melakukan pelanggaran pada bulan April 2022, maka dengan ini Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan memberikan **surat peringatan pertama** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 peraturan dimaksud, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan HDPP sebesar 5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 09 Juni 2022
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,
Kurniasih Panti Rahayu

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk155920933220609103627